

RETRIBUSI  
2009

PERDA NO. 5, LD 2009/NO. 48 SETDA YOGYAKARTA: 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA  
PERDAGANGAN

ABSTRAK

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), maka perlu dipungut retribusi atas pelayanan pemberian perizinan tersebut.

Dasar hukum Undang-Undang ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 3 Tahun 1982; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; PP No. 1 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan PP No. 53 Tahun 1957; PP No. 36 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 15 Tahun 1998; PP No. 66 Tahun 2000; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 147 Tahun 1998; Permendag No. 36/M.DAG/PER/9/2007; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 2 Tahun 1988; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1 Tahun 1992; Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2005; Perda Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2008; Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009.

Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur tentang retribusi yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Perusahaan. Isi Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini; nama, objek dan subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif; struktur dan besaran tarif retribusi; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat retribusi terutang; penetapan retribusi; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran; sanksi administrasi; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluwarsa penagihan; ketentuan pidana; penyidikan; pengawasan; ketentuan penutup

CATATAN

- Peraturan Daerah ini diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 April 2009
- Penjelasan berisi 2 halaman